

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Hukum merupakan peraturan berupa norma atau sanksi yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban. Berdasarkan penggolongan hukum di Indonesia, terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis.<sup>1</sup> Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat oleh lembaga yang diberikan wewenang untuk membentuk undang-undang, yaitu lembaga legislatif, contoh dari hukum tertulis adalah Undang–Undang Dasar 1945, Tap MPR, dll. Sedangkan peraturan yang tidak tertulis dapat berupa hukum adat, hukum agama dan peraturan lainnya.

Berdasarkan Herarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. TAP MPR
3. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti UU
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah
  - a. Perda Provinsi
  - b. Perda Kabupaten/Kota

---

<sup>1</sup> “penggolongan hukum berdasarkan bentuknya”, *kompas.com*, 24 juni 2022.

c. Perdes/peraturan yang setingkat<sup>2</sup>

Dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah sangat jelas menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menjadi landasan utama dalam menjalankan negara Indonesia. Tanpa terkecuali dalam urusan pertahanan negara yang mempunyai peraturan istimewa dalam susunan perundang-undangan di Indonesia.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman dalam arti setiap usaha dan kegiatan, yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman tersebut diantaranya ancaman dari dalam negeri yang terdiri atas, pemberontakan, perang saudara, aksi teror dalam negeri, gerakan separatis dan moralitas bangsa, sedangkan ancaman dari luar negeri diantaranya, agresi, pelanggaran wilayah, sabotase dan spionase.<sup>3</sup>

Untuk menjaga dan mengatasi berbagai ancaman di Indonesia maka seluruh elemen masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mempertahankan negara. Masyarakat yang ikut memberikan usahanya dalam mempertahankan negara disebut bela negara.

---

<sup>2</sup> Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Salah Satu Sistem", *Madani Legal Review Malrev 1, no.2(2017):12*.

<sup>3</sup> Berni, "eksistensi dan peran resimen mahasiswa dimasa mendatang" (slide power point palu 2022), 11.

Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.<sup>4</sup> Menwa merupakan bagian dari warga negara yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan serta pelatihan dasar kemiliteran yang wajib guna keikutsertaannya dalam usaha bela negara.

Keikutsertaan masyarakat dalam usaha bela negara diselenggarakan melalui:

#### 1. Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara, yang diselenggarakan di lingkungan pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Kemudian nilai dasar bela negara yang dimaksud adalah, cinta tanah air, sadar bangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan kemampuan awal negara.

#### 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ( Jakarta, 2019), 3.

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang dimaksud adalah hanya diberlakukan bagi warga negara sebagai calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan.

3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib,
4. Pengabdian sesuai dengan profesi.

Pengabdian sesuai dengan profesi disiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Untuk menghadapi ancaman ancaman militer dan ancaman hibrida dilakukan melalui keanggotaan komponen cadangan dan/atau komponen pendukung. Sedangkan untuk mengahdapi ancaman non militer dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Dengan itu seluruh tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia.

berdasarkan jenisnya komponen pertahanan negara dibagi menjadi 3 jenis antara lain:

1. Komponen utama

Adalah tentara nasional indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan

2. **Komponen cadangan**

Adalah sumber daya manusia yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen cadangan dikelompokkan menjadi, komponen cadangan matra darat, komponen cadangan matra laut, dan komponen cadangan matra udara. Setiap warga negara berhak mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota komponen cadangan apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

3. **Komponen pendukung**

Adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.<sup>5</sup>

Komponen pendukung terdiri atas:

- a. Anggota kepolisian negara republik indonesia
- b. Warga terlatih

Warga terlatih terdiri atas:

- 1) Purnawirawan tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia;
- 2) Anggota resimen mahasiswa
- 3) Anggota satuan polisi pamong praja;
- 4) Anggota polisi khusus

---

<sup>5</sup> Ibid., 2..

- 5) Anggota satuan pengamanan
  - 6) Anggota perlindungan masyarakat dan
  - 7) Anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih.
- c.** Tenaga ahli dan
- d.** Warga lain unsur warga negara.<sup>6</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pasal 31 ayat satu (1) huruf b menyatakan bahwa Resimen Mahasiswa sebagai bagian dari warga terlatih yang merupakan komponen pendukung pertahanan Negara. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 sudah sangat jelas bahwa Resimen Mahasiswa mempunyai dasar hukum yang menjadikan Menwa sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) resmi secara negara, sebagaimana yang menjadi definisi dari negara Indonesia adalah negara hukum.

Selain dari pada negara Indonesia adalah negara hukum, negara Indonesia juga merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, yang tentunya nilai-nilai agama islam banyak terdapat dalam konsep bernegara di Indonesia, tanpa terkecuali dalam urusan politik, dalam ajaran islam ilmu politik biasa juga disebut dengan istilah *siyash syariah*, yang juga terbagi dalam beberapa jenis bidang keilmuan.

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, "peraturan Pemerintah R.I Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara" (jakarta, 2021), 17.

Menurut imam al-mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) ,dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).Adapun imam ibn taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah khariyyah* (hubungan internasional).<sup>7</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berkaitan dengan bagaimana kajian *siyasah dusturiyyah* terhadap dengan pernyataan Resimen Mahasiswa sebagai komponen pendukung pertahanan negara, disamping ada peraturan pemerintah yang menyebutkan hal tersebut, apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan program-program atau aktifitas Resimen mahasiswa Satuan 252 Wirakarma UIN Datokarama Palu. Maka untuk mengetahui itu semua, penulis tertarik melakukan penyusunan penelitian dalam bentuk Skripsi penelitian dengan judul : “Peranan Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara perspektif *Siyasah Dusturiyah*”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup>.Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet ke-1;Jakarta:Prenadamedia Group,2014 M),15.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status atau kedudukan hukum resimen mahasiswa satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu sebagai komponen pendukung pertahanan negara dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*?
2. Bagaimakah peranan resimen mahasiswa sebagai komponen pendukung pertahanan negara?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk menganalisis status dan juga kedudukan hukum resimen mahasiswa sebagai komponen pendukung pertahanan negara dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*.
2. Untuk mengkaji peranan resimen mahasiswa sebagai komponen pendukung pertahanan negara

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan dan referensi dalam menyusun atau merumuskan Undang-undang yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan ilmu mengenai kewenangan pemerintah dalam mengatur masalah negara tanpa terkecuali permasalahan pertahanan negara.

- c. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kajian ilmu *dusturiyah* dan pertahanan negara
2. Secara praktis
    - a. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kalangan mahasiswa bahwa peranan resimen mahasiswa dilingkup perguruan tinggi yang sangat penting dalam mewujudkan kesadaran bela negara.
    - b. Diharapkan juga menambah wawasan terlebih dahulu pada diri kita jika suatu saat mempunyai keinginan bergabung menjadi anggota resimen mahasiswa Indonesia, dalam melaksanakan aktivitasnya pada roda organisasi.

#### **D. Penegasan Istilah/ Definisi Oprasional**

Sebelum kita masuk dalam pembahasan inti, maka penulis terlebih dahulu ingin menegaskan pengertian dari beberapa istilah dalam proposal skripsi ini, untuk menyamakan persepsi, diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Tinjauan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata tinjauan memiliki arti, pandangan tau sebuah pendapat, kemudian tinjauan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> “ arti tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, Lektor. ID.<https://kbbi.lektur.id>

## 2. *Siyasah dusturiyah*

Dusturiyah merupakan bagian bidang dalam ilmu siyasah yang membahas mengenai ketentuan peraturan dalam bernegara. Mengenai konsep *dusturiyah* terdapat pembahasan mengenai bidang-bidang pembahasannya antara lain yaitu konsep konstitusi (UUD negara), legilasi (perumusan undang-undang), demokrasi dan syura. Setelah mengalami penyerapan ke dalam sastra arab, kata *dusturiyah* berkembang menjadi suatu asas, dasar, serta pembinaan yang menurut istilah dapat diartikan suatu kaidah yang mengatur suatu hubungan kerja antar sesama anggota masyarakat terhadap suatu rencana rancangan terhadap tujuan didalam sebuah negara atau dalam serapan bahasa indonesia dapat diartikan sebagai berdasarkan Undang-Undang Dasar dari suatu negara.<sup>9</sup>

Secara bahasa *dusturiyah* berasal dari bahasa persia. Awalnya itu berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menyebut anggota ulama zoroaster (pemimpin agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang maknanya menjadi asas perkembangan dasar. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara,

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (jakarta: Kencana, 2014), 177.

baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *siyasah* secara bahasa artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*”, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Dalam pengertian tersebut pada prinsipnya *siyasah* berkaitan dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.<sup>10</sup>

### 3. Resimen Mahasiswa

Resimen mahasiswa adalah sebuah kekuatan sipil sebagai wadah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Hankamnas harus bermanfaat, guna mewujudkan cita-citanya menjadi sarjana pancasila serta menunaikan dharma baktinya dalam pengabdianya kepada masyarakat maupun dalam kegiatan pembangunan.<sup>11</sup> Dalam halnya menjalankan tugasnya para prajurit resimen mahasiswa (menwa) dibekali ilmu-ilmu keprajuritan seperti wawasan kebangsaan, Peraturan baris-berbaris (PBB), bongkar pasang senjata, survival ,halang rintang, Tata Upacara Militer (TUM) dan Bela Diri Militer (BDM). Semua ilmu yang diberikan dengan tujuan para menwa siap sedia dalam menjalankan tugasnya terutama dalam lingkungan perguruan tinggi. Lahirnya Menwa berdasarkan keputusan bersama Wakil Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor: M/A/20/1963 tanggal 24 januari 1963 Tentang pelaksanaan wajib latih dan pembentukan Resimen mahasiswa dilingkungan Perguruan Tinggi. Pengembangannya

---

<sup>10</sup>. Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah )

<sup>11</sup> Soewardi, "Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Pada Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa Mahadipa Jawa Tengah Tahun 1994" (sambutan disampaikan pada tanggal 2 Maret 1994) ,h.52.

dilakukan dalam satuan-satuan Resimen Induk Mahasiswa (Rinwa).<sup>12</sup> Menwa adalah mahasiswa sipil yang terlatih. Ikhlas dan mampu menjalankan tugas, setiap ibu pertiwi memanggil, setiap diperlukan oleh Negara. Menwa selalu menjunjung tinggi nilai nasionalisme, selalu siap untuk berbakti kepada Negara dan Bangsa, kapan pun.<sup>13</sup> Dalam kaderisasi Menwa semua calon anggota mendapatkan pendidikan bela Negara olah keprajuritan dan kepemimpinan, karena mahasiswa merupakan kelas intelektual yang secara akademis telah menguasai cara berfikir ilmiah. Dengan semboyan “Widya catrena Dharma siddha” yang berarti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan Ilmu Keprajuritan, menwa membentuk akademisi dengan disiplin layaknya militer. dengan diberikannya ilmu militer sudah pasti menwa sebagai unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang mempunyai sitem komando dalam struktur kepengurusannya.

#### 4. Pertahanan Negara

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara .sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga

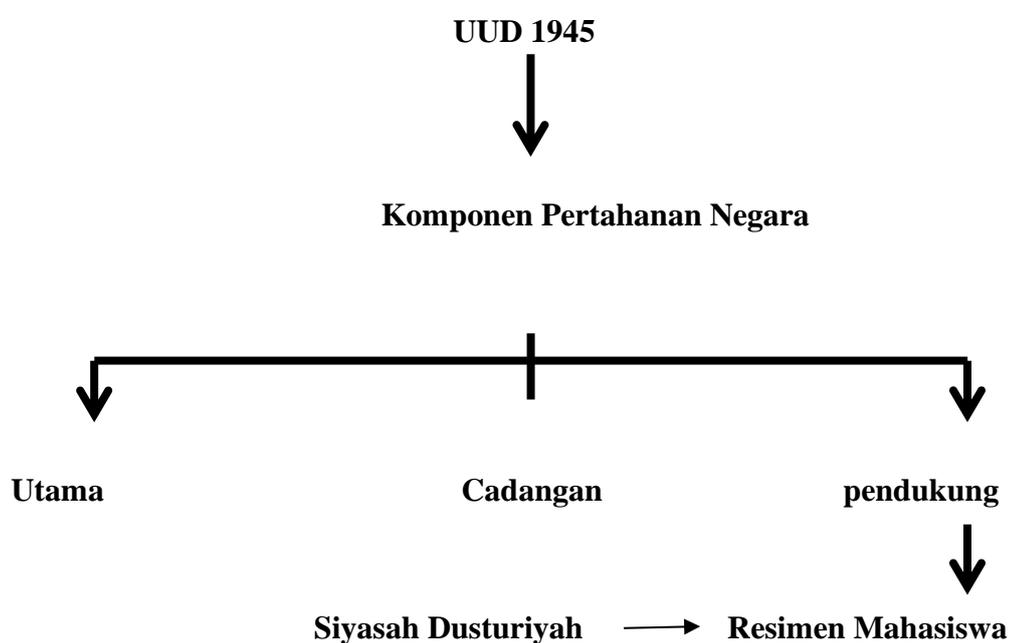
---

<sup>12</sup> Berni, Menwa (Cet.I; Jakarta: Sakera Arpas Media, 2021), 21.

<sup>13</sup> Ibid., 33.

negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.<sup>14</sup>

#### ***E. Kerangka Pemikiran***



#### ***F. Garis-garis Besar isi***

Untuk mempermudah pemahaman bagi para pembaca terhadap skripsi ini, maka penulis membahas secara garis besa apa yang menjadi pembahasan kedepan masalah ini sebagai berikut adalah sebagai berikut.

Bab pertama, diawali dengan pendahuluan yang menggambarkan secara umum dan pentingnya penelitian ini dilakukan.pada bab ini berisi latar

<sup>14</sup> Arief Fahmi, *Studi Perencanaan Wilayah Pertahanan dalam Tinjauan Antropologi Hukum*, ed. Qiara Media ,(Pasuruan, Jawa Timur, 2021), 72.

belakang masalah. selanjutnya dirumuskan dalam pokok masalah (rumusan masalah) yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini, sehingga jelaslah masalah yang akan dijawab. Kemudian terdapat tujuan dan kegunaan penelitian untuk melihat signifikasikan dari penelitian ini, penegasan istilah yang berisikan penjelasan atau definisi singkat dari kata-kata yang termuat dari judul skripsi penulis, dan garis-garis besar isi yang memberikan gambaran mengenai skripsi ini.

Bab II, merupakan bab kajian pustaka yang berisikan 5 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, kemudian kajian teori yang terdiri dari, teori-teori peranan, sejarah singkat resimen mahasiswa Indonesia, penjelasan dari komponen pendukung pertahanan negara dan bagian-bagiannya, penyajian teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah* menurut pakar tata negara Islam (Al-Mawardi, Ibnu Taymiyah, dan Munawir Sjadzali, serta kerangka pemikiran yang akan menggambarkan alur penelitian ini.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan bab pembahasan dan hasil penelitian

Bab V merupakan bab penutup

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Dalam kajian pustaka, penulis akan menguraikan beberapa referensi yang berkaitan dengan proposal skripsi ini, menyajikan penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

- a. Penelitian yang berjudul “Persepsi Menwa terhadap Wajib Militer dalam Rangka pertahanan negara.penulis meneliti mengenai persepsi menwa terhadap wajib militer dalam rangka pertahanan negara dengan difokuskan pada menwa universitas Gajah Mada dan menwa universitas Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa: menurut persepsi menwa, wajib militer sangat diperlukan diberlakukan di Indonesia karena tidak cukupnya komponen utama dalam pertahanan.adapun faktor-faktor

yang mendorong diberlakukannya wajib militer di Indonesia adalah adanya rasa nasionalisme, terdapatnya ancaman bagi negara, serta adanya sumber kekayaan alam yang perlu dilindungi dari negara lain. Sementara strategi wajib militer yang tepat bagi Indonesia menurut persepsi menwa adalah diberlakukan bagi warga negara berusia 19-30 tahun, dengan lama latihan 3-4 bulan hingga 1 tahun dalam bentuk latihan militer dan latihan moral. Kesimpulan dari peneliti ini adalah menwa selaku generasi muda yang memiliki peran strategis berpersepsi bahwa di Indonesia perlu dilakukan wajib militer meski tingkat kebutuhannya tidak mendesak. Wajib militer tersebut dapat didorong oleh beberapa faktor diantaranya rasa nasionalisme dan

ancaman.<sup>15</sup> persamaan antara penelitian yang dibuat oleh Siti Fadilah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan *menwa* sebagai objek penelitiannya, namun perbedaannya terlihat pada subjeknya, penelitian yang dilakukan oleh Siti menggunakan pertahanan negara sebagai subjek penelitiannya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *siyasah dusturiyah* sebagai subjek penelitian.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Ariana dengan judul “Peran Resimen Mahasiswa dalam membangun kesadaran Bela Negara Mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar” yang mengemukakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana peran resimen mahasiswa dalam membangun kesadaran bela negara? Apa kendala yang dialami dalam upaya pembinaan bela negara?, jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan informan untuk melakukan wawancara dan observasi. Sumber data adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan sumber hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi keputusan untuk melengkapi data-data primer. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran resimen mahasiswa dalam membangun kesadaran bela negara di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, yaitu: menjadi stabilisator, membantu menjalankan misi universitas yaitu membantu kelancaran pengamanan

---

<sup>15</sup> Siti Fadilah, “*Persepsi Resimen Mahasiswa (Menwa) terhadap Wajib militer dalam Rangka Pertahanan Negara*” (Yogyakarta: Perpustakaan universitas Gadjah Mada, 2018)

wisuda, penerimaan mahasiswa baru, turut serta dalam memperingati hari kemerdekaan. Adapun kendala yang dihadapi mahasiswa dalam membangun kesadaran bela negara UIN Alauddin Makassar yaitu, sulitnya surat izin yang dikeluarkan pihak birokrasi, kurangnya kesadaran dalam diri mahasiswa pentingnya bela negara, kurangnya bantuan dana dari pihak Universitas. persamaan yang diteliti oleh ita ariana sama-sama menggunakan menwa sebagai topik dalam judulnya, namun perbedaannya terletak pada subjeknya, penelitian yang dilakukan oleh Ita ariana menggunakan menwa sebagai subjeknya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengguna *siyasah dusturiyah* sebagai subjek penelitiannya. <sup>16</sup>

- c. Penelitian yang dilakukan oleh adelia Putri yang berjudul “Peran Komandan Resimen Mahasiswa Terhadap Pembentukan Loyalitas Anggota”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran pemimpin meningkatkan loyalitas anggota menwa dengan memberika ruang bagi para anggota untuk ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penghambat dan pendukung loyalitas tujuan penelitian ini ialah bila kesesuaian tidak tercapai, anggota akan meninggalkan organisasi menwa, faktor pendukung ialah hubungan antara pemimpin dan anggota

---

<sup>16</sup> Ita Ariana, “*Peran Resimen Mahasiswa Dalam Membangun Kesadaran Bela Negara Mahasiswa Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*”(Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Alauddin ,Makassar, 2018), xv.

menagandung rasa percaya dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pelaksanaan hubungan yang terjalin dalam organisasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program kerja dan peran komandan resimen mahasiswa terhadap pembentukan loyalitas anggota. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan dilingkupan kampus UIN dan pengurus UKM Menwa angkatan 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja komandan Menwa dalam meningkatkan jiwa loyalitas terhadap anggota terbagi menjadi dua yaitu dalam lingkup kampus misalnya mendorong anggota ikut serta dalam kegiatan Rapat Komando yang dilaksanakan dalam lingkungan kampus dan diluar lingkungan kampus misalnya kerjasama bersama TNI Bandar Lampung dalam mengadakan agenda Pendidikan Dasar Militer (DIKSARMIL) guna meningkatkan jiwa loyalitas terhadap anggota menwa. Kesimpulan penelitian ini yaitu Menwa sebagai salah satu UKM yang bersifat internal. Peran menwa yang dilakukan dalam meningkatkan jiwa loyalitas yaitu memberika ruang bagi para anggota yang ikut serta berperan aktif dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan dunia militer. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Resimen Mahasiswa sebagai objek penelitiannya, sedangkan perbedaanya terletak pada subjek

penelitiannya, subjek penelitian yang dipakai Adelia Putri adalah Jiwa loyalitas anggota sedangkan subjek penelitian dari penulis adalah Kajian *Siyasah Dusturiyah*.<sup>17</sup>

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Deriansyah Maulana Akbar, sebagai syarat dalam memperoleh sarjana Agama di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beliau menulis skripsi yang berjudul “sistem pertahanan negara dalam perspektif al-qur’an kajian tafsir tematik “.dalam rumusan masalah terdiri atas, bagaimana sistem pertahanan negara dalam perspektif al-qur’an?, kedua bagaimana relevansi sistem pertahanan negara dalam al-qur’an dengan sistem pertahanan di Indonesia?.

Penelitian ini termaksud penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan tafsir tematik (*mawdhu’i*). Hasil penelitian dalam penafsiran buya Hamka terdapat pada surah *Al-Anfal* ayat 60 terkait pertahanan negara, ayat ini menjelaskan betapa pentingnya untuk mempersiapkan dan mengarahkan semua potensi yang ada yaitu semua komponen yang terdapat dalam negara<sup>18</sup>. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objeknya yang sama-sama membahas pertahanan negara, namun perbedaannya terdapat pada subjek penelitiannya, Deriansyah

---

<sup>17</sup>Adelia Putri “*Peran Komandan Resimen Mahasiswa Terhadap Pembentukan Loyalitas Anggota*” (Skripsi Tidak diterbitkan, Prodi Pemikiran Politik Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2020), ii.

<sup>18</sup> Deriansyah Maulana Akbar, “Sistem Pertahanan Negara Indonesia dalam Perspektif Al-Qur’an Kajian Tafsir Tematik” (Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021), xiii

maulana akbar mengambil subjek penelitian Al-Qur'an kajian tafsir tematik dengan tafsiran buya hamka, sedangkan penulis mengambil subjek penelitian kajian *Fiqh Siyasah* yang terfokus pada teori *Siyasah Dusturiyah*. kemudian terdapat pada jenis dan pendekatan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*mawdhu'i*), sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris.

- e. Penelitian yang dilaksanakan oleh Akhmad Thole Bainher untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan hukum tata negara di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitiannya yang berjudul "sistem pertahanan dalam piagam madina perspektif seni perang sun tzu", yang memiliki rumusan masalah, bagaimana piagam madina sebagai sistem pertahanan dilaksanakan?, yang kedua bagaimana sistem pertahanan dalam piagam madina menurut teori pertahanan dalam seni erang sun tzu?. Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library research*). Hasil dari penelitian ini piagam madina sebagai sitem pertahanan memenuhi indikator pertahanan menurut sun tzu yang mencakup: Ideologi dan moral, kondisi geografis, medan,

komando kepemimpinan, manajemen. Kemudian sistem pertahanan dalam piagam madina ada dua cara: perang dan diplomasi.<sup>19</sup>

### ***G. Kajian Teori***

#### **a. Konsep Pertahanan Negara dalam Islam**

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.<sup>20</sup>

Pertahanan negara di zaman Nabi Muhammad Saw dapat dilihat dari pembentukan sistem sosial kemasyarakatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Ketahanan nasional dibidang ideologi yang berdasarkan ideologi islam sebagai kitab sucinya Al-qur'an.

---

<sup>19</sup> Akhmad Thole Baiher, “Sistem Pertahanan dalam Piagam Madina Perspektif Seni Perang Sun Tzu” ( Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara,Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 133

<sup>20</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008* ( Jakarta:Departemen Pertahanan RI, 2008),39

- b. Ketahanan nasional dibidang persatuan yang diikat dengan suatu perjanjian yaitu ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum anshar.
  - c. Ketahanan nasional dibidang ekonomi, dimana nabi muhammad Saw menerapkan nilai-nilai yang bersumber ajaran islam yaitu Al-qur'an, dan menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dibidang ekonomi.
  - d. Ketahanan nasional dibidang politik yaitu, nabi muhammad Saw merumuskan piagam madinah yang berlaku bagi seluruh penduduk madinah baik orang muslim maupun non muslim (yahudi). Piagam inilah yang oleh ibnu hasyim disebut Undang-Undang dasar negara islam (Daulah Islamiyah) yang pertama
  - e. Ketahanan nasional dibidang sosial dan budaya
  - f. Ketahanan bidang persaudaraan ukhuwah islamiyah yang kokoh
  - g. Ketahanan nasional dibidang militer pertahanan keamanan (hankam)<sup>21</sup>
- b. Konsep Jihad Membela Negara dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan

Konsep jihad adalah konsep yang dinamis, ia bisa mengalami perkembangan sesuai dengan konteks yang mengirinya. Jihad membela atau mempertahankan negara menurut hemat penulis diwujudkan dalam menjaga

---

<sup>21</sup>Abdul Ghani, Ketahanan Nasional Dalam Perspektif Al-Qur'an,"*Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* .<https://journal.uinjkt.ac.id> (10 November 2022)

prinsip-prinsip atau nilai-nilai anatar lain : *ittihad* ( persatuan), *al-syura* ( musyawarah ), *al-'adalah* (keadilan), *al-hurriyyah ma'a mas'uliyah* (kebebasan disertai tanggung jawab ), kepastian hukum, jaminan *haq al-ibad* (HAM) dan lain sebagainya.

#### 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Salah satu bentuk jihad mempertahankan negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi agama, suku bahasa dan bangsa, maka menjaga persatuan dan kesatuan adalah sebuah tantangan dan tugas kita bersama. Apalagi wilayah indonesia terdiri dari berbagai kepulauan yang dipisahkan sekaligus dihubungkan oleh lautan. Kekuatan ini tidak mungkin diraih tanpa persatuan, dan persatuan tidak dapat dicapai tanpa persaudaraan dan kebersamaan serta kemauan untuk menghormati satu sama lain.

#### 2. Menanamkan Nilai Nasionalisme Religius

Nasionalisme secara sederhana adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan diwujudkan suatu konsep identitas bersama suatu kelompok manusia.<sup>22</sup> Nasionalisme religius yang maksud adalah paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan

---

<sup>22</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki> Nasionalisme diakses tanggal 21 Desember 2022

semangat keagamaan. Artinya agama menjadi suatu spirit dan nilai untuk menegakkan suatu negara yang adil dan makmur.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103 terdapat konsep pertahanan negara secara tersirat,

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ  
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ  
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahannya :

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”<sup>23</sup>

Dalam tafsirannya pada surah Al-imran ayat 103 kementerian Agama Republik Indonesia memberikan keterangan

Pada ayat ini Allah memerintah kaum mukmin menjaga persatuan dan kesatuan. Dan berpegang teguhlah sebagai berikut : serta berusaha sekuat tenaga agar kamu semuanya bantu-membantu untuk menyatu pada tali (agama) Allah agar kamu tidak tergelincir dari agama tersebut. Dan janganlah kamu bercerai berai, saling bermusuhan dan mendengki, karena semua itu akan menjadikan kamu lemah dan

---

<sup>23</sup>. “Mushaf Al-Qur'an Kemenag,” pustaka Lajnah, <https://quran.kemenag.go.id> (30 April 2023)

mudah dihancurkan. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.<sup>24</sup>

Dengan ini dapat juga dikatakan bahwa dengan menjaga persatuan dan kesatuan serta berpegang teguh pada tiang agama dapat menjadi dinding untuk mempertahankan sebuah negara.

Dalam hadist juga diterangkan tentang pertahanan negara sebagai berikut :

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ  
جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ

"Jika ada orang yang datang kepada kalian, ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang (sebagai pemimpin), lalu dia ingin merusak persatuan kalian atau memecah jama'ah kalian, maka perangilah ia".<sup>25</sup>

(HR. Muslim)

<sup>24</sup> "Surat Ali Imran Ayat 103 Arab, Latin,terjemahan dan Tafsir", *tafsirweb.com*.  
<https://tafsirweb.com> ( 7 Januari 2023)

<sup>25</sup>. "Kumpulan hadist lengkap,"hadist Id. <https://www.hadits.id> (30 April 2023)

Hal yang terpenting dalam pertahanan negara adalah seorang pemimpin, seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat besar pada masa depan sebuah negara, dalam hadist tersebut dianjurkan bahwa kita sebagai orang atau rakyat wajib untuk memerangi jika seorang pemimpin melakukan tindakan dengan tujuan ingin merusak persatuan dan kesatuan diantara sesama.

c. Dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang bela negara pada Surah At-Taubah : 122

مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ؟

Terjemahan : Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?

26

Dalam tafsiran Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

Dan tidak patut bagi kaum mukminin semuanya keluar memerangi musuh mereka, sebagaimana yang tidak dibenarkan bagi mereka untuk tinggal semua. Mengapa tidak keluar untuk berperang dan berjihad dari setiap golongan sejumlah orang yang memadai dan mewujudkan mashlahat; tujuannya agar orang-orang yang tinggal bisa mendalami agama Allah dan mengetahui apa yang terbaru dari hukum-hukum

---

<sup>26</sup>. "Mushaf Al-Qur'an Kemenag," pustaka Lajnah, <https://quran.kemenag.go.id> (30 April 2023)

agama Allah dan wahyu yang diturunkan pada rasulNya, agar mereka nanti memperingatkan kaum mereka dengan ilmu yang mereka pelajari tatkala mereka kembali kepada kaumnya itu. Mudah-mudahan mereka takut kepada siksaan Allah dengan menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya.

#### d. Resimen Mahasiswa

##### 1. Sejarah Resimen Mahasiswa

Mengingat penyusupan komunisme dan aksi gerombolan DI/TII yang (secara bawah tangan bekerja sama dengan APRA Westerling), maka kodam siliwangi membentuk wajib Latih (Wala).berdasarkan keputusan panglima III/siliwangi No 40-25/S/1959, wala yang dimulai sejak 1959, pesertanya terdiri dari mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat (ITB dan universitas Padjajaran). Angkatan pertama Wala dilatih oleh devisi siliwangi, pada 13 Juni sampai 14 September 1959, kelak disebut batalyon wajib latih.

Satuan atau Batalyon Wala Siliwangi yang diberi hak mengenakan lambang siliwangi, dipersiapkan sebagai perwira cadangan untuk mendukung TNI dalam operasi pagar betis penumpasan gerombolan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat. Juga terjadi kegentingan hubungan dengan malaysia ( berujung pada Tuntutan Dwikora), serta irian barat yang tak kunjung dikembalikan oleh belanda, sehingga presiden soekarno memerintahkan Trikora. Maka batalyon wala siliwangi yang bisa dibilang

sebagai “pilot Project”, berlanjut dengan pembentukan Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) diseluruh Indonesia, oleh TNI. Pada tahun 1961, dimulailah pelaksanaan pendahuluan walawa, khususnya di Jawa, krena jumlah kampus saat itu belum banyak, dan masih terpusat di Jawa. Personil Walawa akan disertakan dalam Operasi Dwikora (1962-1965) dan operasi Trikora alias Operasi merebut Irian Barat kembali ke NKRI. Di kampus-kampus sejak 1962, juga berlangsung pembentukan korps sukarelawan dilingkungan Perguruan Tinggi untuk membantu operasi Trikora.<sup>27</sup>

Sejak April 1964, Menwa terbentuk di setiap Kodam, berdasarkan instruksi Menko Hankam/kasab Nomor : AB/34046/1964 tanggal 21 April 1964. Diperkuat dengan keputusan Bersama (SKB Dua Menteri) Menko Hankam/Kasab dan Menteri PTIP Nomor: M/A/165/1965 dan Nomor : 2/PTIP/^5 tentang Organisasi dan prosedur Resimen Mahasiswa. Sejak itu pula, menwa memiliki kualifikasi Tamtama walawa. Bintara dan Perwira.

Meski nama Menwa sudah resmi digunakan, namun istilah Walawa masih lebih dikenal dibeberapa wilayah. Salah satunya di Yogyakarta, seperti disampaikan Pak Burhan “Kampak”, tokoh sipil yang dikenal sebagai penumpas PKI di Yogyakarta dan sekitarnya (kurun 1966-1970).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>. Berni, *Jati Diri Menwa*, No.020 ( Januari-Februari 2022),5

<sup>28</sup> Ibid ,7

Lahirnya Resimen Mahasiswa berdasarkan keputusan bersama wakil menteri pertama pertahanan dan keamanan Menteri Perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan Nomor : M/A/20/1963 tanggal 24 Januari 1963 tentang pelaksanaan Wajib Latih dan pembentukan Resimen mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi. Pengembangannya dilakukan dalam satuan-satuan Resimen Induk Mahasiswa (RINWA), yang diatur dalam keputusan Bersama Wampa Hankam dan menteri PTIP Nomor : 14A/19-20-21/1963 Tentang Resimen Induk Mahasiswa.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum lahirnya Resimen mahasiswa

- 1) Pasal 30 ayat 1 Undang-undang NRI Tahun 1945 tentang hak dan kewajiban setiap warga negara iut serta dalam setiap upaya pembelaan negara.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019.

---

<sup>29</sup> Baerni, *Menwa Terabaikan Disimpang zaman Tetap Lurus Walau Salah Urus* (Cet. I;Jakartan,PT Sakera Arpas Media,2021),21

5) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah republik Indonesia Tahun 2000 Tentang pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.

c. Fungsi dan Tugas serta Tujuan Resimen Mahasiswa

1) Fungsi Resimen Mahasiswa adalah sebagai berikut :

- (a) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan, baik organisasi maupun perorangan
- (b) Melaksanakan pembinaan disiplin anggota komando Resimen Mahasiswa baik sebagai mahasiswa maupun sebagai warga negara.
- (c) Bersama mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang dinamis.
- (d) Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program perguruan tinggi serta program kemahasiswaan lainnya.
- (e) Membantu menumbuhkan, meningkatkan sikap bela negara dan perlindungan dimasyarakat.
- (f) Membantu TNI dan POLRI dalam melaksanakan pembinaan dan pertahanan keamanan negara dalam keadaan tertentu.

2) Tujuan.

- (a) Sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara.
- (b) Mempersiapkan mahasiswa yang disiplin, berwawasan kebangsaan, mempunyai fisik dan mental yang kuat agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anggota resimen mahasiswa serta menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional (mencerdaskan bangsa)
- (c) Sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam usaha pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (d) Sebagai wadah pengembangan potensi dan bakat mahasiswa dalam berorganisasi secara teratur, terarah dan terencana.

### 3). Tugas Pokok

- (a) Membantu terlaksananya pembinaan kesadaran bela negara serta kelancaran kegiatan dan program lainnya di perguruan tinggi.
- (b) Merencanakan, mempersiapkan dan menyusun potensi-potensi-potensi nasional dalam rangka menyesuaikan pembangunan.

(c) Memantapkan ketahanan nasional dengan melaksanakan usaha dan kegiatan rakyat terlatih.<sup>30</sup>

d. Dinamika Resimen Mahasiswa

Cerdas, disiplin, nasionalis, kompak, rapih, kuat fisik dan mental serta berwibawa itulah yang wajib ada didalam diri seorang anggota resimen mahasiswa. Didalam sejarah menerangkan menwa punya peran penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia terutama dalam menumpas paham-paham komunis yang bertentangan dengan dasar kita dalam berbangsa dan bernegara.

Menwa adalah mahasiswa sipil yang terlatih, ikhlas dan mampu menjalankan tugas setiap ibu pertiwi memanggil, setiap diperlukan oleh negara. Menwa selalu menjunjung tinggi nasionalisme, selalu siap berbakti kepana bangsa dan negara kapan pun.<sup>31</sup>

Sebagai menwa dididik dan dilatih agar mahasiswa punya kesiapan dan mental baja dalam menghadapi apapun, seburuk apapun. Penekanan pendidikan menwa dan kelas adalah pendidikan kepemimpinan untuk pelatihan lapangan utamanya adalah olah keprajuritan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>.Asas, Dasar, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Resimen Mahasiswa, “ [menwa.uii.ac.id](https://menwa.uii.ac.id). <https://menwa.uii.ac.id> ( 9 Novemer 2022).

<sup>31</sup> Berni, *Menwa Terabaikan Disimpang zaman Tetap Lurus Walau Salah Urus* (Cet. I;Jakarta,PT Sakera Arpas Media,2021),33

<sup>32</sup>Ibid.,34

Awal karir menjadi seorang anggota Resimen Mahasiswa dengan mengikuti pra pendidikan dasar selama 2-3 hari dengan tujuan mengenal lingkungan kampus dan dasar ilmu-ilmu dalam organisasi serta kepengurusan yang menjabat. Selanjutnya wajib mengikuti pendidikan dasar militer yang dilaksanakan di lembaga pendidikan atau lingkungan militer kurang lebih satu minggu lamanya. Dalam pendidikan dasar militer ini terdiri dari materi ruangan dan lapangan yang dilatih langsung dengan Tentara Nasional Indonesia. Resimen Mahasiswa juga memiliki pendidikan lanjutan seperti Kursus Kader Pelaksana (Suskalak), Kursus Dinas Staf (KDS), Kursus Kader Pemimpin (Suskapin), dan Latihan Kepemimpinan Putri. Setelah mengikuti berbagai pendidikan yang ada di menwa, seluruh anggota wajib mengabdikan dan ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan menwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya di lingkungan kampus maupun luar kampus.

Menwa adalah organisasi nasional, karena ada di tiap provinsi. Dan setiap agenda dalam jenjang pendidikan menwa bertujuan untuk menghasilkan generasi muda yang terbaik yang dibekali ilmu kepemimpinan dan keahlian dibidangnya. Sejarah mencatat sebelum reformasi menwa kerap dilibatkan dalam pengiriman perbantuan dharma bakti di Timor Timur.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid.,35

Resimen Mahasiswa memiliki semboyan “ Widya Castrena Darma Siddha” yang artinya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dalam maknanya pengabdian seseorang mahasiswa akan sempurna jika ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan disatukan, dalam hal ini arti dari keprajuritan adalah sikap nasionalis, disiplin, jujur, berwibawa, kuat fisik dan mental serta bijak dalam mengambil tindakan jika berhadapan dengan permasalahan yang serius ( layaknya jiwa seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia). Resimen mahasiswa memiliki baret berwarna ungu, lambang pena dan senjata di kerak bajunya melambangkan mulia, berpengetahuan dan terpelajar. Pena dan senjata memiliki makna bahwa menwa adalah mahasiswa atau kaum intelektual yang mendapat serangkaian pelatihan kepemimpinan, nasionalisme, loyalitas terhadap persatuan bangsa, dan kedisiplinan yang didapat dari pelatihan keprajuritan.

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Tiga Menteri Tahun 2000 telah membuat kedudukan menwa melemah disemua daerah dan kampus-kampus dalam artinya seluruh kegiatan dan pembiayaan menwa menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing. Pada situasi yang lain tiap provinsi punya anggaran yang berbeda. Ada provinsi yang memberikan anggaran besar untuk skomennya, tetapi ternyata pengurus skomenya yang tidak berkualitas, ada pula yang skomenwa (staf komando menwa)

bersungguh-sungguh ingin membangun menwa, tetapi terganjal oleh kemampuan pendanaan.

SKB Tiga Menteri Tahun 2000 tidak ada lagi jalur struktural dari menwa terhadap TNI, seperti pada pasal 1 SKB Tiga Menteri : “kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang keprajuritan, kedisiplinan dan wawasan bela negar dilaksanakan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.” Dampak dari dikembalikannya menwa pada perguruan tinggi masing-masing adalah tidak diketahuinya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis resimen mahasiswa versi SKB 2000 berada, dampak kedua adalah standar menwa berbeda-beda disetiap kampus. Baik dalam kualitas maupun kuantitas pendidikan kemenwaan dan kegiatannya bergantung pada kemampuan kampus masing-masing. Artinya anggaran dan birokrasinya juga berbeda-beda.<sup>34</sup>

Pada permasalahan dalam kepemimpinan resimen mahasiswa seorang komandan satuan (dansat) punya peranan penting dalam perkembangan organisasinya di perguruan tinggi masing-masing. Selain itu juga harus sanggup menyediakan penggantinya demi eksistensi Resimen Mahasiswa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

---

<sup>34</sup>.Ibid.,95

Sebagai anggota dari Resimen Mahasiswa sepatutnya bangga dengan identitasnya yang dinobatkan sebagai komponen pendukung pertahanan negara, hal tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 pada pasal 26 ayat 1 poin a menyatakan salah satu komponen pendukung pertahanan negara adalah warga negara, dijelaskan lebih rinci pada pasal 31 yang termasuk dalam warga negara salah satunya pada poin b ayat satu adalah Resimen Mahasiswa. Namun pada peraturan Pemerintah ini cukup menjelaskan Resimen Mahasiswa sebagai komponen pendukung pertahanan negara, untuk pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan SKB 3 Menteri Tahun 2000 telah mengembalikan kepada perguruan tinggi masing-masing.

e. *Siyasah Dusturiyah*

Kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula, artinya ”seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidag politik maupun agama”. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kositusi).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaran Dalam Islam Siyasah Dusturiyah (Cet.I Bandung:Pustakan Setia,2012) 19.

*Siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

*Siyasah dusturiyah* mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta lembaga-lembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal dibawah ini :

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya
  - b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
  - c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman
  - d. Kajian tentang *waliyul ahdi*
  - e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*
  - f. Kajian tentang pemilihan umum.<sup>36</sup>
- f. Konsep *siyasah dusturiyah* pemikiran Ibnu Taymiyah dalam kitab *Al-Siyasah Al-Syariyyah Fi Islah Al-Rai Wa Al-Ra'iyah*.

Nama lengkap Ibnu Taymiyah adalah Ahmad Taqi al-Din abu Al-abbs Ibn Abdul Halim Ibn Abd-Salam Abdullah Ibn Muhammad Ibn Taymiyah. Yang lahir 22 Januari 1262 di Harran, dekat Damaskus, dari keluarga ulama Syria

---

<sup>36</sup> Ibid,23

yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat pada mazhab hambali. Sang kakek, Abdus salam adalah ulama pengkaji (pemuka) agama yang terkemuka di Bagdad, ibukota kekhilafahan Abbasiyah dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun terakhir kehidupannya.<sup>37</sup>

Dalam pandangan Ibnu Taymiyah kewajiban mendirikan sebuah negara atau kekuasaan, bukan berdasarkan *ijma'*, sebagaimana pendapat kebanyakan para pemikir sunni. Ia lebih lanjut menekankan bahwa keberadaan suatu negara merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat islam. Menurut Ibnu taymiyah, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan masyarakat. Untuk mengaturnya tidak bisa tidak memerlukan pemimpin. Dalam keterangannya yang lain, disebutkan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umat didunia dan diakhirat serta untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat dan mungkar. Diperlukan seorang pemimpin serta rakyat harus mematuhi.<sup>38</sup> Pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat, ia didasarkan kepada hadis dan karakteristik ajaran islam. Hadits yang dimaksud antara lain, sabda rasulullah saw : “Apabila ada tiga orang melakukan perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka”, dan sabda yang lain

---

<sup>37</sup> Ibnu Taymiyah, Wikipedia Indonesia. <https://Id.m.Wikipedia.org> ( 3 Januari 2023)

<sup>38</sup> Ibnu taymiyah, *majmu'a-rasail al-kubra* (kairo:Maktabah al-Misriyyah). Jilid I.36

“tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditengah padang pasir, kecuali mereka mengangkat seorang dari mereka untuk jadi pemimpin mereka”. Sedangkan karakteristik ajaran islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang teraniaya, dan melaksanakan hukum (hudud). Semuanya tidak biasa dilaksanakan kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Karena itu, diawal pembahasannya mengenai masalah ini, ia menegaskan bahwa mengatur orang banyak termasuk kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali ada pemimpin.<sup>39</sup>

Dengan demikian menegaskan pemerintahan bagi Ibnu Taymiyah karena ajaran agama. Dibentuknya pemerintahan itu dimaksudkan untuk mengabdikan karena Allah<sup>40</sup>. Pengabdian dan pimpinan kepada Allah dan Rasulnya merupakan pendekatan diri kepada Allah . jadi pemerintahan merupakan alat mengabdikan kepada Allah bukan alat untuk mencari kedudukan dan materi. Jika yang tersebut yang terakhir terjadi maka akan rusak binasalah segala urusan. Dalam kaitannya pentingnya pemerintahan, ia mengutip pendapat yang mengatakan : “enam puluh tahun dibawah pemerintahan

---

<sup>39</sup> Ibnu Taymiyah, *as-siyasah as-syariah Fi Islah al-Rai’wa al-Ra’iyyah* (Bairut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1988)135

<sup>40</sup> Ibid,139

dibawah seorang kepala negara yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang kepala negara”<sup>41</sup>.

Jadi jelas bahwa alasan mendirikan negara bagi Ibnu Taymiyah bukan karena pertimbangan *ijma'* tetapi karena perintah agama mewujudkan kesejahteraan umat, mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan, menegakan keadilan, menggalang persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk melaksanakan syariat Islam. Untuk merealisasikan memerlukan kekuasaan dan pemimpin karena pemerintah bertujuan untuk mengabdikan kepada Allah, menurut Ibnu Taymiyah mendirikan negara merupakan kewajiban agama, dan rakyat harus menaatinya. Bila tidak, maka tujuan-tujuan yang positif itu tidak mungkin tercapai.

a. Landasan Amanah dan Keadilan dalam Praktik Pelenggaraan Negara.

Amanah dan keadilan sangat mewarnai pemikiran politik Ibnu Taymiyah. Karenanya dua hal itu tidak dapat dipisahkan dalam praktik penyelenggaraan negara. Hal tersebut merupakan implementasi yang sangat besar dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Bila amanah tersebut ditunaikan dengan sangat baik maka keadilan pun akan terwujud. Dalam surah An-Nisa ayat 58 disebutkan: 'sesungguhnya Allah

---

<sup>41</sup> Ibid, 140

memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya, dan memerintahkan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia agar kamu tetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu dan sungguh allah itu dzat yang maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Ayat diatas berkenan dengan pemerintahan dan kepemimpinan dalam memelihara amanah dan menegakkan keadilan. Karena itu, dalam mengurus kepentingan umat pemegang kekuasaan dalam menetapkan pejabatnegara harus mengutamakan orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan, bukan karena ada ikatan primordial.<sup>42</sup> Sedangkan ayat 59 surah an-nisa “hai orang-orang beriman taatlah kamu kepada allah dan taatlah kepada rasulnya dan kepada pemimpin kamu, maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikan hal itu kepada allah dan rasulnya, jika kamu orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu merupakan sikap terbaik”.

Ayat diatas ditujukan kepada rakyat. Disamping menaati perintah allah dan rasulnya mereka juga harus menaati segala kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka tidak boleh

---

<sup>42</sup>.Anton Afrizal, “Pemikiran Siyasa Syar’iyah Ibnu Taymiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam sistem pemerintahan islam)”, *Journal.uir.ac.id*.<https://journal.uir.ac.id> (2 Januari 2023).

taat kepada pemerintahan yang melakukan maksiat. Dalam pandangan Ibnu Taymiyah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin negara menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Ini akan terealisasi apabila pemerintah didasarkan pada sistem yang baik dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil<sup>43</sup>.

Selain menyampaikan amanah dan penegakan keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin negara harus membudayakan musyawarah. Sebab, Allah telah memerintahkan hal itu kepada rasulnya. Perintah musyawarah kepada nabi untuk mengikat hati para sahabatnya, dan menjadi teladan bagi umat yang akan datang kemudian. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw membudayakan musyawarah dikalangan sahabatnya. Suka bersuyawarah merupakan cerminan salah satu sifat orang yang beriman dan dipuji Allah. Jika musyawarah telah dilakukan ternyata sebagian besar menghendaki agar mengikuti petunjuk kitab dan sunnah atau ijma kaum muslimin, maka menurut Ibnu Taymiyah wajiblah mengikuti kehendak itu. Tidak seorang pun dapat menyimpang dari pendapat demikian, sekalipun ia seorang terkemuka dalam lapangan agama atau politik. Pemimpin (ulil amri) dalam surah an-nisa ayat 59 menurut pendapat Ibnu Taymiyah terdiri dari

---

<sup>43</sup> Munawir Djadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikirannya*, (edisi ke v)85

para pemimpin negara dan ulama. Pandangan seperti ini hampir sama dengan pendapat al-ghazali<sup>44</sup>.

b. Islam dan Bentuk Negara

Ibnu Taymiyah sedikitpun tidak menyinggung bentuk konstitusi negara islam. Ia hanya menampilkan bahasan mengenai urgensi kekuasaan dalam menegakan syariat dan kewajiban umat untuk mematuhi. Jadi syariat dihargai karena kandungan dan isinya. Tidak adanya rujukan bagi bentuk pemerintahan disitu tidak dianggap sebagai sebuah ketidaksempurnaan, tetapi justru sebagai akibat kebijaksanaan allah yang tidak mengikat.

Kehadiran ibnu taymiyah dengan pandangannya tentang syariat sebagai sumber kekuasaan final dan standar mutlak bagi segala ragam kekuasaan dan kekuatan menghindarkan sebuah gerakan/islam dari pengaruh theokrasi<sup>45</sup>. dalam sistem itu, posisi ulama tidak bisa disamakan dengan kedudukan para pendeta kerana kekuasaan mereka tidak berasal kordinasi pemerintah, tetapi berakar pada pengetahuan mereka tentang syariat, suatu kenyataan bagi yang memungkinkan

---

<sup>44</sup>Jeje, Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-ghazali dan ibnu taymiyah (surabaya : Pt.Bina Ilmu,1999)135

<sup>45</sup> Theokrasi adalah sistem politik dalam praktiknya menjalankan pemerintahan dengan berpegang pada kedaulatan tuhan.

setiap muslim berpengetahuan memiliki kedudukan sebagai alim (orang yang berpengetahuan agama)<sup>46</sup>

c. Pengangkatan Kepala Negara

Ibnu Taymiyah menegaskan kewajiban seorang pemimpin dalam menempatkan para pejabat negara lebih dulu meneliti siapa-siapa yang berhak menjadi pemimpin akan wakil-wakil seluruh daerah sebagai wakil pemegang kekuasaan (kepala negara) dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Dalam memilih dan menempatkan seseorang haruslah orang yang terbaik dan lebih utama diantara yang ada untuk menduduki jabatan itu karena memang haknya, hendaklah ia menunaikan amanah dan kewajiban itu. Jika ia telah melakukan dengan sebaik-baiknya, berarti ia dipandang sebagai pemimpin yang berlaku menurut pandangan Allah.

Ibnu taymiyah juga juga menerapkan asas maslahat. Dalam pandangan ibnu taymiyah sistem pengangkatan kepala negara bisa dengan modal atau bentuk apa saja, asalkan ia sanggup menjaga amanah dan menciptakan keadilan bersama. Engan hanya menggariskan

---

<sup>46</sup> Anton Afrizal, "Pemikiran Siyasa Syar'iyah Ibnu Taymiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam sistem pemerintahan islam)", *Journal.uir.ac.id*.<https://journal.uir.ac.id> (2 Januari 2023).

landasan etika dan moral, seperti kualitas dan integritas serta kecakapan bagi orang yang menempati jabatan dipemerintahan, maka pendapatnya itu lebih memungkinkan berlaku dalam semua sistem kekuasaan<sup>47</sup>.

d. Tujuan Negara

Ibnu taymiyah berbicara tentang pentingnya ada pemerintahan, bahwa tujuan mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelolah urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar (menganjurkan orang yang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat atau tercela)<sup>48</sup>, dan misi dan tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan. Dengan kata lain, bahwa keberadaan negara itu perlu tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat, erta terpenuhinya kebutuhan materi semata, tetapi lebih dari itu, adalah menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibnu Taymiyah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Pustaka Shadra :Jakarta,2002)10

<sup>49</sup> Munawir Djadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikirannya*, (edisi ke v)89

g. Konsep ketatanegaraan Menurut Imam Al-Mawardi Dalam Terjemahan Kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*

Al-Mawardi (975-1058) berpendapat bahwa sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala negara dan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian ini lahirnya hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala negara berhak menurunkan kepala negara, bila ia dipandang tak mampu lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun demikian, al-mawardi juga menekankan kepatuhan kepada kepala negara yang telah dipilih. Kepatuhan ini tidak hanya kepada kepala negara yang adil, tetapi juga yang jahat(fajir). Untuk mendukung pendapatnya ini, al-mawardi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh abu-hurairah :

“Akan ada kelak pemimpin-pemimpin kamu sesudahku. Diantara mereka ada yang baik dan memimpinmu dengan kebajikannya, tetapi ada juga yang jahat dan memimpin kamu dengan kejahatannya. Dengarkanlah dan patuhi mereka sesuai kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebajikannya untuk kamu dan untuk mereka. Tetapi kalau mereka jahat, maka (akibatnya baiknya) untuk kamu dan kejahatannya kembali kepada mereka.”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* ,(Cet,I:Beirut,1996)162

Bila kepala negara telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi rakyatnya. Hak kepala negara atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara menjalankan pemerintahan dengan baik. Dalam hal yang pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak. Kepala negara hanya diatuhi dan ditaati selama ia dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai ajaran islam dan tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan islam. Kalau syarat dengan demikian tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuhi. Itulah sebabnya dalam hal yang kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala negara dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasehat dan peringatan kepada kepala negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik<sup>51</sup>.

Al-mawardi memberikan indikasi tidak bolehnya rakyat taat kepada kepala negara, yaitu jika ia tidak berlaku adil dalam pemerintahannya dan hilangnya kemampuan fisiknya. Sikap tidak adil kepala negara dapat dilihat melalui kecenderungan memperturutkan nafsu seperti melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan mungkar serta melakukan hal-hal yang syubhat<sup>52</sup>

#### 1. Pengangkatan Pimpinan Jihad

---

<sup>51</sup> Ibid,17

<sup>52</sup> Ibid, 18

Secara etimologi jihad adalah perjuangan dengan mengarahkan segenap kemampuan, baik dengan perjuangan dalam bentuk melawan musuh dimedan pertemuan, atau perjuanagan tanpa terjun dimedan pertempuran. Sehingga muslim yang berjuang dengan meuntut ilmu kemudian berdakwah di jalan allah SWT sudah termasuk mujahid (pelaku Jihad).

Menurut Abdurrahman bin hamad ali imran, jihad terbagi dua, yaitu dalam pengertian umum dan khusus. Jihad dalam pengertian umum adalah seorang muslim bersungguh-sungguh dalam menggapa sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, serta menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang olehnya. Sedangkan dalam pengertian khusus adalah memerangi kaum kafir dalam rangka menegakkan kalimatullah yaitu syariat Allah<sup>53</sup>.

Secara khusus, wewenang pimpinan jihad adalah untuk memerangi kaum musyrikin. Wewenang ini ada dua macam yaitu sebagai berikut :

- 1). Ia mempunyai wewenang sebatas mengatur tentara dan menyusun strategi perang. Dalam memegang tugas itu, ia harus memenuhi syarat-syarat kepemimpinan khusus.

---

<sup>53</sup>“Memahami makna Jihad dan Macamnya”,Jateng.nu.or.id. <https://jateng.nu.or.id> (2 Januari 2023)

2). Pemimpin jihad ini diberi mandat penuh untuk menangani seluruh masalah yang berhubungan dengan jihad, seperti pembagian Ghanimah dan mengikat perdamaian. Pejabat ini diharuskan memenuhi syarat-syarat kepemimpinan umum. Ia adalah bagian dari kepejabatanan khusus yang mempunyai hukum paling besar serta mempunyai pasal dan bagian yang paling lengkap. Jika pejabat ini adalah pejabat yang mempunyai wewenang umum, ia juga berwenang atas tugas yang diemban oleh model pejabat yang khusus, sehingga kami hanya menyebutkan model pejabat ini untuk meringkasnya<sup>54</sup>

b. Kewajiban yang harus di jalankan oleh kepala negara

- 1) Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan para ulama salaf
- 2) Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.
- 3) Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.

---

<sup>54</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Cet,I:Beirut,1996)74

- 4) Menegakan hudud (pidana islam), sehingga hukum allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpenuhi.
  - 5) Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar
  - 6) Berjihad melawan musuh-musuh Allah yang membangkang dari dakwah islam
  - 7) Mengelolah keuangan negara seperti Ghanimah, al-fai, pajak, dan sedekah lainnya.
  - 8) Menentukan belanja negara
  - 9) Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut
  - 10) Secara langsung mengolah urusankenegaraansecara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.<sup>55</sup>.
7. Ketatanegaraan Menurut Munawir Sjadjali dalam karyanya yang berjudul Islam dan Tata Negara

---

<sup>55</sup> .Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* ,(Cet,I:Beirut,1996) 15-16

Munawir Sjadzali menyebutkan enam prinsip dalam ketatanegaraan islam yang terdiri dari prinsip kedudukan manusia dimuka bumi, musyawarah, ketaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat beragama.

a. Prinsip kedudukan manusia di bumi.

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakannya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (QS.al-baqara, 2:30, al-am, 6:165, Yunus,10:14, dan lain-lain). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelolah dan memeliharanya dari kehancuran.

b. Prinsip Musyawarah

Musyawarah disebutkan secara tegas dalam al-qur'an di tiga ayat, yaitu al-baqara, 2:233, ali-imran,3:159, dan asy-syura 42:38. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa musyawarah memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam monokrasi islam yang posisinya hanya setingkat di bawah kewajiban shalat.

c. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya, pada surah an-nisa, 4:59 Allah menerangkan kata "athi u" hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada pemimpin (ulil al-amr).

d. Prinsip keadilan.

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan. Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menekankan keadilan adalah surah An-nisa, 4:58, 105 dan 135, al-nahl 16:90 dan al-maidah, 5:6.

e. Prinsip persamaan

Islam tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah (QS.al-hujarat, 49:13). Karena itu, tidak ada seorang pun yang berhak memperoleh perlakuan khusus didepan hukum. Nabi Muhammad Saw mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa diawali oleh sikap

diskriminatif dalam penegakan hukum. Mereka menghukum rakyat jelata yang bersalah, tetapi membiarkan bangsawan atau elite masyarakat yang melakukan tindakan melawan hukum.

f. Prinsip hubungan yang baik antar manusia

Munawir sjadzali meletakkan landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah. Dalam piagam madinah ditegaskan bahwa umat islam , walaupun berasal dari berbagai kelompok, adalah suatu komunitas. Hubungan ini di landasi atas prinsip bertetangga baik, saling menghadapi musuh bersama, mebelah orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1990)* 15-16

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian***

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (*Empirical Legal research*), ini merupakan penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris sebagaimana tersebut diatas merupakan penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Karenanya dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang merupakan pendekatan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja ditengah masyarakat.

##### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Datokarma Palu khususnya pada UKM Resimen Mahasiswa Pawana Cakti Satuan 252 Wirakarma UIN Datokarama Palu.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dengan memperhatikan karakteristik dari penelitian hukum empiris, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian kenyataan yang terjadi dilapangan. Selain itu, peneliti dilokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peran peneliti bersifat aktif dilapangan dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Untuk memperoleh data-data atau yang diperlukan penulis dalam mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan beberapa sumber data.yang digunakan dlam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

#### ***h. Sumber data primer***

Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019
- 3) Peaturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2021

#### ***i. Sumber data sekunder***

Data sekunder adalah hasil observasi dan wawancara serta bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian,baik berupa buku-buku,artikel,dan jurnal maupaun hasil penelitian dari para sarjana.

### ***E. Tehnik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

### ***F. Tehnik Analisis Data***

Dalam penelitian ini digunakan tehnik analisis sebagai berikut

1. Deskriptif, yang merupakan bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.
2. Preskriptif, yaitu analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>57</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang dipeoleh guna mengukur validitas hasil penelitian.

Dalam penelitian iini digunakan triangulasi sebagai tehnik untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data. Tehnik ini dilakukan dengan cara melakukan

---

<sup>57</sup>Muhaimin, Metode Penelitian Hukum ( Cet.I; Mataram: Mataram Universty Press, 2020,)

perbandingan data dengan data yang berasal dari suatu yang berbeda diluar data<sup>58</sup>.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu**

##### **1. Sejarah Menwa Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu**

Resimen Mahasiswa pertama kali dibentuk oleh Jendral Besar A.H Nasution pada pemerintahan orde lama, misi dan tujuan dari pembentukan resimen mahasiswa terutama untuk membendung penyebaran paham komunis dalam kampus, dihadapkan dengan”ancaman nyata” yaitu organisasi kepartaian termasuk PKI seperti CGMI(Central Gerakan Mahasiswa Indonesia ) dan lain-lain.

Resimen Mahasiswa Pawana Cakti Sulawesi Tengah terbentuk pada tahun 1977 hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan Pendidikan dan latihan dasar militer pertama angkatan pertama di paneki mulai tanggal 19 Januari

---

<sup>58</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif ( Cet.I; Jakarta:Prenada Media Group,2007),256

– 17 Februari 1977 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 132/Tadulako dengan No.SPRIN.10/1/1977.<sup>59</sup>

Terbentuknya Resimen Mahasiswa Pawana Cakti Sulawesi Tengah tahun 1977 sebagai cikal bakal dibentuknya batalyon Resimen Mahasiswa disetiap perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah. Tokoh penting cikal bakal menwa di Sulawesi Tengah adalah Rusdi Toana, Baharuddin HT, dan Letnan Kolonel WS Pottu sebagai komandan Resimen Mahasiswa pertama di Sulawesi Tengah, dengan membebtuk

---

<sup>59</sup>Udin Jefri. “Sejarah Lahirnya Resimen Mahasiswa Pawana Cakti (1976-2013)” (Skripsi diterbitkan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Tadulako, Palu, 2014)32

Batalyon 251 , Batalyon 252 ( Yang sekarang menjadi satuan 252 Wirakrma Uin Datokarama Palu) dan Batalyon 253.

Resimen Mahasiswa Pawana Cakti kemudian membentuk beberapa batalyon , Batalyon 251 berkedudukan di Universitas Tadulako, yakni dikampus Universitas Tadulako di jalan Setia Budi ( sekarang menjadi lab school), yang selanjutnya pindah dijalan Soekarno Hatta di Untad baru. Batalyon 252 Wirakarma berkedudukan di IAIN Alaudin Palu ( sekarang Beralih status menjadi UIN Datokarama palu), serta Batalyon 253 Aptisi berkedudukan di Universitas Muhammadiyah di jalan Hang Tuah yang selanjutnya di STIK IJ di Palu.<sup>60</sup>

Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakrma Uin Datokarama Palu mulai aktif dan dihitung berdiri pada tahun 1992 dengan komandan batalyon pertama bapak Drs.H.Imran. dengan dua kompi yaitu kompi A Fakultas Tarbiyah dan kompi B Fakultas Ususluddin. namun sekarang status menwa 252 yang dulunya batalyon telah menjadi satuan. Dikarenakan kepala staf resimen mahasiswa pawana cakti Sulawesi Tengah menegur bahwa menwa 252 bukan berbentuk batalyon melainkan berbentuk satuan, maka dari itu sejak tahun 2009 Resimen Mahasiswa 252 sudah berbentuk satuan hingga sekarang.

Seiring dengan perkembangan zaman Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu tetap eksis sampai sekarang dan

---

<sup>60</sup> Ibid,70

banyak memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program-program yang dilaksanakannya, mulai dari program yang bertujuan untuk menambah keilmuan setiap anggota maupun program yang bersifat sosial.

## 2. Letak geografis

Resimen Mahasiswa Pawana Cakti Satuan 252 wirakarma Uin Datokarama Palu terletak di Jalan Diponegoro No.23, Lere, Kecamatan Palu Barat kota palu Sulawesi Tengah.

## 3. Visi dan misi

### a. Visi

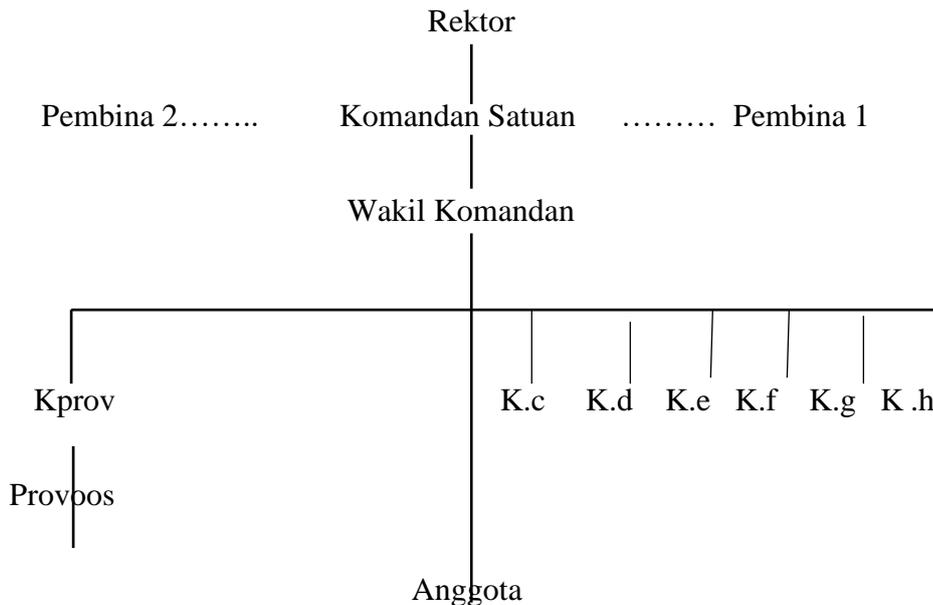
Menjadikan Menwa satuan 252 Wirakarma Uin datokarama Palu yang intelektual, Religius, Terlatih dan kompatibel sesuai fungsi menwa

### b. Misi

- 1). Memperkokoh jiwa korsa, kebersamaan dan persaudaraan dengan dilandasi panca dharma satya, tekad pendirian serta bhineka tunggal ika
- 2). Meningkatkan kualitas anggota menwa satuan 252 Wirakarma dalam bidang pendidikan serta pengetahuan agama sebagai mahasiswa Uin Datokarama Palu yang religius.
- 3). Mengevaluasi dan melanjutkan program kerja sebelumnya yang belum terlaksana untuk mengembangkan eksistensi satuan dan fungsi menwa di kampus.

- 4). Mengoptimalkan pelatihan-pelatihan di hari dinas untuk mewujudkan anggota satuan yang kuat dan terlatih.

4. Struktur kepengurusan Tahun 2022



- a. Komandan Satuan, adalah jabatan yang paling tinggi pada ukm ini, Melakukan kebijakan dan penggunaan MENWA sesuai kebijakan pimpinan KAMPUS (REKTOR)/BIROKRASI. Membuat program kerja MENWA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi MENWA. Memimpin dan mengadakan koordinasi untuk menjamin terlaksananya program kerja MENWA, Membina hubungan baik dan melaksanakan koordinasi dengan pihak luar MENWA, Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor. pada tahun 2022 jabatan ini

diamanahkan kepada Salman Al-Farisi, beliau merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab.

- b. Wakil Komandan Satuan, merupakan jabatan yang dipilih langsung oleh Komandan Satuan yang akan membantunya dalam kepemimpinan ukm pada satu periode. Melaksanakan pembinaan MENWA sehari-hari sesuai dengan kebijakan Komandan MENWA. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan tata kerja di dalam MENWA. Mewakili Komandan MENWA apabila berhalangan. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Komandan MENWA Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan. pada tahun 2022 wakil komandan satuan adalah Andi Yasmin Fajri, mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Islam
- c. Kepala Urusan Khusus, adalah jabatan yang bertugas khusus yang diberikan oleh komandan dan wakil komandan satuan. Pada urusan internal maupun eksternal. Melaksanakan tugas khusus satuan, Melaporkan setiap tugasnya kepada komandan satuan, Kaursus pada tahun 2022 adalah Moh.Arief, seorang mahasiswa Program Studi Hukum keluarga.
- d. Kepala Urusan Administrasi, adalah jabatan yang bertugas mengatur administrasi dan pengarsipan dokumen satuan, baik domunen atau surat yang keluar maupun surat masuk. Reni Lasmi adalag aslogben pada tahun 2022, seorang mahasiswi jurusan sejarah peradaban islam.

- e. Asisten Logistik dan Bendahara, adalah jabatan yang bertugas Merumuskan rencana, petunjuk dan perintah di bidang logistik. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas logistik. Mengikuti perkembangan situasi dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan atau keterangan serta menyajikan informasi dibidang logistik. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dansat menwa mengenai hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Dansat menwa. Pada tahun 2022 aslogben diamanahkan kepada Nurfadillah Seorang mahasiswi Prodi tadris Bahasa Inggris.
- f. Kepala kesekretariat, jabatan ini diberikan wewenang untuk membantu kepala Urusan Administrasi (Kaurmin) dalam membuat surat masuk dan keluar. Pada tahun ini diemban oleh Puspa, seorang mahasiswi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
- g. Kepala Asisten Informasi Hubungan Masyarakat, jabatan ini bertugas dan berwenang Merumuskan rencana, petunjuk dan perintah di bidang hubungan masyarakat. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan dalam rangka pemberitaan dan atau penerangan mengenai menwa, Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain, Membentuk pendapat umum yang positif mengenai Menwa, Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dansat menwa mengenai hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Dansat menwa. Di Tahun 2022 jabatan ini dipegang oleh Muhabil

- h. Kepala Urusan Pendidikan dan Latihan, adalah jabatan yang mengatur aktivitas anggota setiap harinya, Merumuskan, merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan dan latihan, Melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penggunaan Menwa. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Dansat menwa . Tahun 2022 yang bertugas sebagai Kaurdiklat adalah Moh.Rifki, seorang mahasiswa jurusan Perbankan Syariah.
- i. kepala asisten urusan pendidikan dan latihan. Yang mempunyai tugas, Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan atau keterangan di bidang pendidikan dan pelatihan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan penggunaan dan pembinaan Menwa. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dansat menwa mengenai hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Dansatmenwa yang bertugas sebagai kasudiklat adalah Moh.Rifandi, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Islam.
- j. Komandan Pokok Pasukan, adalah jabatan yang mengontrol keaktifan anggota dalam berpartisipasi dalam kegiatan satuan. Menjabarkan dan melaksanakan perintah Komandan, Memimpin anggota dalam

melaksanakan kegiatan MENWA. Membina kesiapan fisik dan mental para anggota. Mengelola administrasi Anggota. Mengelola komunikasi antara jajaran atas dengan para anggotanya dan sebaliknya. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan. Afriani adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang juga merupakan pemegang amanah dari Danpokpas tahun 2022.

- k. Komandan Pokok Markas, adalah jabatan yang bertugas Melaksanakan Peraturan Urusan Dinas Dalam Pengelolaan dan perawatan kesatrian, Perawatan fasilitas dan perlengkapan, Pengelolaan logistik dan perbendaharaan, Keprotokolanan (serangkaian aturan atau tata cara yang menjadi rujukan ketika mengadakan acara resmi dan menyambut tamu yang berkunjung ke Markas. Aturan ini meliputi tata tempat, dan tata penghormatan untuk menghormati tamu sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang disandangnya.) Membantu penegakan disiplin dan tata tertib anggota. Dan yang bertugas sebagai komandan pokok markas adalah Moh. Rifai seorang mahasiswa prodi Tadris Ips.
- i. Kepala dan provos, adalah jabatan yang bertugas Menjadi contoh dan panutan bagi anggota, Penegakan disiplin anggota, Melaksanakan pengamanan, Petugas protokoler, Pengawasan VIP, Pengaturan lalu lintas.

**B. Kedudukan hukum Resimen Mahasiswa satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu sebagai Komponen Pertahanan Negara dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.**

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Usaha pertahanan dilakukan dengan sistem pertahanan semesta oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Kontribusi dalam hal pertahanan dan keamanan bukan berarti setiap warga negara wajib serta terlibat dalam bidang militer, melainkan menerapkan bela negara dikehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tanpa terkecuali warga negara yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Dalam lingkungan kehidupan kampus para mahasiswa bukan hanya wajib melaksanakan ketentuan akademik namun juga dihadapkan dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang kadang menyimpang dari ideologi bangsa, hal ini dikarenakan mahasiswa adalah generasi yang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin diseluruh penjuru negeri. Dengannya banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan suatu kaum atau agama yang ingin merusak ideologi bangsa dengan melakukan doktrinisasi kepada mahasiswa pada lingkungan kampus.

Oleh karena itu pemerintah mengambil upaya untuk menangkal pemahaman yang menyimpang pada lingkungan perguruan tinggi dengan membentuk sebuah organisasi internal kampus melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Resimen Mahasiswa sebagai upaya negara dalam mempertahankan kemerdekaan pada bidang pertahanan ideologi bangsa.

Berikut ini dijelaskan mengenai berbagai dasar hukum dan aturan-aturan Resimen Mahasiswa satuan 252 Wirakarm UIN Datokarama Palu baik sebagai

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM ) maupun sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 148 Tahun 2022 tentang pengesahan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Resimen Mahasiswa Pawana Cakti Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu Periode 2022

Unit kegiatan mahasiswa adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI. Keanggotanannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/prodi. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing sesuai Dengan Ad/Art masing-masing.<sup>61</sup>

2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
3. Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor: Kep/03/III?1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Resimen Mahasiswa

Resimen mahasiswa adalah Rakyat Terlatih yang merupakan salah satu perwujudan keikutsertaan Mahasiswa dalam bela negara. Mahasiswa indonesia sebagai generasi muda merupakan potensi nasional yang memiliki

---

<sup>61</sup>. Republik Indonesia, “Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Peguruan Tinggi Keagmaan Islam “, (Jakarta :2016),9

jumlah cukup besar dan sudah terorganisir dalam perguruan tinggi, oleh karena itu mudah untuk mendidik dan melatih mahasiswa menjadi ratih dan juga mampu melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (Linmas). Dari berbagai macam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) khusus yang pembinaannya oleh pimpinan perguruan tinggi dilaksanakan oleh komandan Resimen Mahasiswa.

4. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa

Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan, dan wawasan bela negara dilaksanakan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan menjadi tanggung Jawab Pimpinan Perguruan Tinggi. Pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa sebagai Komponen pertahanan Negara menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan. Pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat menjadi tanggung jawab menteri dalam negeri dan otonomi daerah.<sup>62</sup>

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

---

<sup>62</sup> Berni, *Menwa Terabaikan Disimpang zaman Tetap Lurus Walau Salah Urus* (Cet. I; Jakarta, PT Sakera Arpas Media, 2021), 56

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia, dengan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam usaha pertahanan negara melibatkan semua elemen masyarakat yang terbagi menjadi 3 komponen pertahanan negara yaitu komponen utama, cadangan dan pendukung.

Pada peraturan pemerintah ini disebutkan resimen mahasiswa sebagai bagian dari komponen pendukung pertahanan negara, pada pasal 31 yang menyebutkan menwa sebagai warga terlatih kedua setelah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Nergara Republik Indonesia.

6. Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **C. Peranan Resimen Mahasiswa sebagai Komponen pendukung pertahanan negara**

Resimen Mahasiswa adalah unit kegiatan mahasiswa yang mempunyai legalitas sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Segala kegiatan yang dilaksanakan tidak lain bertujuan untuk membina kesadaran bela negara bagi mahasiswa. Diantaranya sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban anggota Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu.
  - a. Hak

- 1). Mengikuti kegiatan Resimen Mahasiswa
- 2). Mengikuti pelatihan
- 3). Mengikuti pendidikan lanjutan dan khusus
- 4). Menggunakan seragam menwa secara benar.
- 5). Menggunakan fasilitas menwa dalam memperlancar kegiatan menwa
- 6). Memperoleh pembinaan karir
- 7). Memperoleh hak-hak sebagaimana ditetapkan di perguruan tinggi masing-masing.
- 8). Memperoleh penghargaan atas pengabdianya sebagai anggota Resimen Mahasiswa pada negara, perguruan tinggi dan menwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. kewajiban

- 1). Menjunjung tinggi, memahami, menghayati, dan mengamalkan ideologi pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945
- 2). Menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik mahasiswa
- 3). Menjadi teladan bagi masyarakat dalam penampilan sikap hormatnya kepada bendera sang merah putih, lagu kebangsaan indonesia raya, presiden, wakil presiden, lambang-lambang kebangsaan, pejabat-pejabat tinggi negara, serta pimpinan/dosen perguruan tinggi.

- 4). Melaksanakan setiap perintah dinas yang diberikan kepadanya dan melaporka hasil penugasannya.
- 5). Menjunjung tinggi kehormatan almamater perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.
- 6). Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 7). Membantu kelancaran dan pelaksanaan program perguruan Tinggi
- 8). Berperan aktif untuk menjamin terwujudnya kebijakan perguruan tinggi.
- 9). Membantu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran bela negara.
- 10). Melaporkan keberangkatan dan kedatangannya kepada atasan langsung sebelum dan sesudah melaksanakan tugasnya.
- 11). Pada waktu berpakaian seragam menyampaikan penghormatan sesuai dengan peraturan penghormatan yang berlaku.
- 12). Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku baik dilingkungan Resimen Mahasiswa atau perguruan tinggi masing-masing maupun masyarakat umum.<sup>63</sup>

## 2. Program Kerja Unit Kegiatan Mahasiswa Menwa Satuan 252 Wirakarma Uin datokarama Palu Tahun 2022.

---

<sup>63</sup> Udin Jefri. “Sejarah Lahirnya Resimen Mahasiswa Pawana Cakti (1976-2013)” (Skripsi diterbitkan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Tadulako, Palu, 2014)56

#### a. Pra Pendidikan Dasar

kegiatan Pra Pendidikan Dasar merupakan kegiatan awal pengenalan segala aktifitas kemahasiswaan dalam menjalankan tugasnya sebagai Unit Kegiatan Kemahasiswaan, juga sebagai kegiatan yang mengenalkan seluruh anggota kepengurusan Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma UIN Datokarama Palu.



Gambar : kegiatan Pra Pendidikan Dasar  
Resimen Mahasiswa sat 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu

#### b. Donor Darah

Kegiatan donor darah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan disetiap tahunnya. Berawal dari ramainya orang yang datang ke markas komando menwa (mako) dan bertanya kepada anggota apakah ada seseorang yang bisa mendonorkan darahnya untuk diberikan kepada keluarga orang tersebut, maka dengan hal tersebut Menwa Satuan 252 Wirakarma Uin Palu berinisiatif membuat kegiatan donor darah , dengan tujuan menumbuhkan rasa kepedulian, membantu kepada masyarakat

yang membutuhkan dan juga memberikan manfaat bagi tubuh sang pendonor.

c. Seminar Bela Negara

Seminar Bela Negara merupakan adalah program kerja tambahan dari Ukm Menwa Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama palu, tujuan dilaksanakannya adalah sebagai penguatan nilai-nilai luhur kebangsaan kepada generasi penerus bangsa. Pada tahun 2022 seminar bela negara dilaksanakan di aula korem Manggala Sakti, yang dihadiri oleh 65 siswa-siswi, mahasiswa sekota palu. Dalam kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yaitu kepala seksi teritorial Korem 132/Tadulako Bapak Kolonel Inf Fifi Zudi Syaifudin dengan materi Mahasiswa dan Pelajar dalam menangkal radikalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Ibu Berni, S.Sos., M.Si dengan materi arti penting menwa dan fungsi menwa dalam kampus. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juni 2022. Pada intinya kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kecintaan menwa terhadap tanah air dengan menanamkan kesadaran berbangsa, peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 pilar kebangsaan, serta memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa.



Gambar : Kegiatan Seminar Bela Negara

d. Pendidikan dan Latihan Dasar

Resimen Mahasiswa adalah adalah salah satu wadah yang berperan dalam membentuk jiwa dan karakter generasi bangsa yang handal, berwawasan kebangsaan, penuh kreativitas dan dedikasi menegakan kesadaran bela negara. Maka dari itu perlu dilakukan pelatihan dan kepemimpinan untuk generasi muda melalui Resimen Mahasiswa. Pendidikan dan latihan Dasar (diklatsar) merupakan sarana bagi anggota Resimen Mahasiswa yang mampu menganalisa, menjabarkan dan melaksanakan suatu rencana operasi secara efektif dalam suatu latihan maupun organisasi satuan Resimen Mahasiswa untuk mencapai hasil yang maksimal dan bermanfaat. Pada tahun 2022 Pendidikan dan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa dilaksanakn di Batalyon Infanteri 711/ Raksatama Kota Palu. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25-31 Juli , dengan diikuti oleh 35 Mahasiswa yang berasal dari 3 kampus di kota Palu, 17 Mahasiswa dari Satuan 252 Wirakrma Uin

Datokarama Palu, 12 Mahasiswa berasal dari Kampus Stik Ij dan Akfar Bifar Palu serta 6 Mahasiswa dari Satuan 251 Wiratama Universitas Tadulako.<sup>64</sup> Sebagai perwujudan komponen pendukung pertahanan negara para calon anggota menwa diberikan pemahaman dasar mengenai ilmu-ilmu keprajuritan baik pemberian materi dalam ruangan maupun luar ruangan, hal inilah yang akan menjadi benteng bagi generasi muda khususnya mahasiswa dalam menangkal berbagai ancaman di negeri ini.



Gambar : Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Menwa

e. Bakti sosial

Resimen Mahasiswa adalah wadah bagi para generasi pemuda yang dapat membentuk karakter dan jiwa nasionalisme selain dari pada itu juga sebagai wadah yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, hal tersebut dapat diwujudkan pada kegiatan bakti sosial. Kegiatan ini merupakan program tambahan dari UKM Resimen

---

<sup>64</sup>Komando Resimen Mahasiswa Pawana Cakti Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu, Laporan Pertanggung Jawaban Pendidikan dan Latihan Dasar (LPJ), (Palu: Menwa, 2022), 24

Mahasiswa sebagai organisasi kemahasiswaan. Pada Tahun 2022 kegiatan Bakti Sosial dilaksanakan di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusambora, yang dilaksanakan selama 3 hari dengan

f. Hari Dinas

Hari dinas adalah kegiatan mingguan yang setiap hari Sabtu dilaksanakan di markas komando Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma yang bertempat di kampus 1 Uin Datokarama Palu. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk melatih keterampilan dan kemampuan anggota dalam berbagai bidang, dalam agendanya terdiri dari pelatihan Peraturan Baris-Berbaris, pelatihan pembinaan fisik, pelatihan administrasi kemahasiswaan, pelatihan bela Diri Militer dan keilmuan lainnya yang berada di UKM Resimen Mahasiswa.

g. Latihan Gabungan dan Lomba Tangkas Menwa Sulawesi Tengah

Program Latihan Gabungan dan Lomba Tangkas Menwa Sulawesi Tengah merupakan kegiatan tambahan yang diinisiatif oleh salah satu alumni Menwa dari Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota menwa berjumlah 39 orang yang berada di Sulawesi Tengah, mahasiswa tersebut yang terdiri dari empat kampus berbeda antara lain, Universitas Tadulako, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan Akademi Farmasi Bina Farmasi Palu. Kegiatan ini diawali dengan lomba pengucapan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan Panca Dharma Satya dan Ditutup dengan pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Bela Negara pada Hari ahad 18 desember 2022. Kegiatan lomba tangkas menwa sulawesi tengah ini sebagai bentuk pembinaan para alumni terhadap menwa aktif untuk selalu melatih dan mempersiapkan diri dalam berbagai kondisi bangsa dengan tetap mempertahankan ideologi dan konstitusi serta pengamalan *Panca Dharma Satya* Resimen Mahasiswa Indonesia di kehidupan sehari-hari.



Gambar : Kegiatan Lomba Tangkas Menwa Sulawesi Tengah

#### h. Rapat Komando Satuan dan Serah Terima Jabatan

Rapat Komando Satuan atau yang biasa disingkat dengan Rakomsat adalah kegiatan terakhir dalam satu tahun kepengurusan Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu. Dalam kegiatan ini merupakan tempat untuk mengambil keputusan tertinggi pada rana ukm, termasuk pencaloan sera pemilihan komandan satuan yang akan menjabat satu tahun berikutnya. Pada tahun 2022 Rkomsat dan Sertijab dilaksanakan pada tanggal 30 Desember dan satu hari

berikutnya dilaksanakan upacara Serah Terima Jabatan Komanda Satuan .

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa dapat disimpulkan dalam Skripsi yang berjudul Peranan Resimen Mahasiswa sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yaitu

1. Terdapat konstitusi Dari UKM Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma Universitas Islam Datokarama Palu sebagai Unit kegiatan Mahasiswa dan melaksanakan fungsinya sebagai komponen pendukung pertahanan negara , seperti Surat keputusan Rektor sebagai legalitas UKM dalam menjalankan programnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang menyatakan menwa sebagai komponen pendukung pertahanan negara.

2. Dari hasil analisis ini bertujuan untuk mengetahui aktifitas Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu yang secara *Siyasah Dusturiyah* diakui oleh negara, dan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam upaya pembelaan negara melalui aktif dalam UKM Resimen Mahasiswa.

#### **B. Implikasi**

1. Dengan banyaknya aktifitas kementerian pasti memerlukan biaya yang sangat besar, dalam hal ini biaya dari pihak universitas sebagai pimpinan tertinggi pada setiap UKM di lingkungan Uin Datokarama Palu tidaklah cukup, harapan kedepan untuk mencukupi biaya tambahannya pemerintahan

disetiap daerah memiliki peranan dan tanggung jawab penting dalam pembiayaan operasional Resimen Mahasiswa dikarenakan besarnya peran dan serta Resimen Mahasiswa dalam upaya pembelaan negara melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya.

2. Sebagai anggota Resimen Mahasiswa wajib mengikuti seluruh agenda dalam akademik perkuliahan dengan sebaik mungkin, hal ini juga agar dapat menjadi teladan bagi mahasiswa lainnya, dan juga harus berani mengambil resiko yang akan terjadi kedepannya jika sewaktu-waktu kampus memerlukan bantuan kita selama menjadi kapasitas dan tanggung jawab dari anggota Resimen Mahasiswa.

### **ABSTRAK**

**Nama Penulis : ANDI YASMIN FAJRI**  
**NIM : 19.3.21.0023**  
**Judul Skripsi : PERANAN RESIMEN MAHASISWA SATUAN 252**  
**WIRAKARMA UIN DATOKARAMA PALU SEBAGAI**

## **KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

---

Dalam usaha pertahanan negara dikalangan mahasiswa pemerintah membentuk sebuah organisasi internal kampus melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) disetiap perguruan tinggi di seluruh pelosok negeri, tujuan dari pembentukan Resimen Mahasiswa pada intinya untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan sebagai benteng ideologi bangsa terhadap berbagai ancaman. Dengan pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah status atau kedudukan hukum resimen mahasiswa sebagai komponen pendukung pertahanan negara dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*; (2) Bagaimakah peranan resimen mahasiswa sebagai komponen pendukung pertahanan negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, melalui sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dari tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun analisis data deskriptif dan dan analisis data deskriptif.

Hasil penelitian yang ditemukan, peranan Resimen Mahasiswa satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu Sebagai komponen pendukung pertahanan negara perspektif *siyasah Dusturiyah* yaitu, (1) secara legalitas hukum di Indonesia Menwa Diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pasal 31 ayat satu (1) huruf b menyatakan bahwa Resimen Mahasiswa sebagai bagian dari warga terlatih yang merupakan komponen pendukung pertahanan Negara. (2) peran Menwa sebagai komponen pendukung pertahanan negara terlihat dari hak dan kewajiban serta kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat kesesuain antara landasan hukum yang mengatur bahwa Resimen Mahasiswa Satuan 252 Wirakarma Uin Datokarama Palu sebagai Komponen pendukung pertahaan negara dengan aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) .